

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

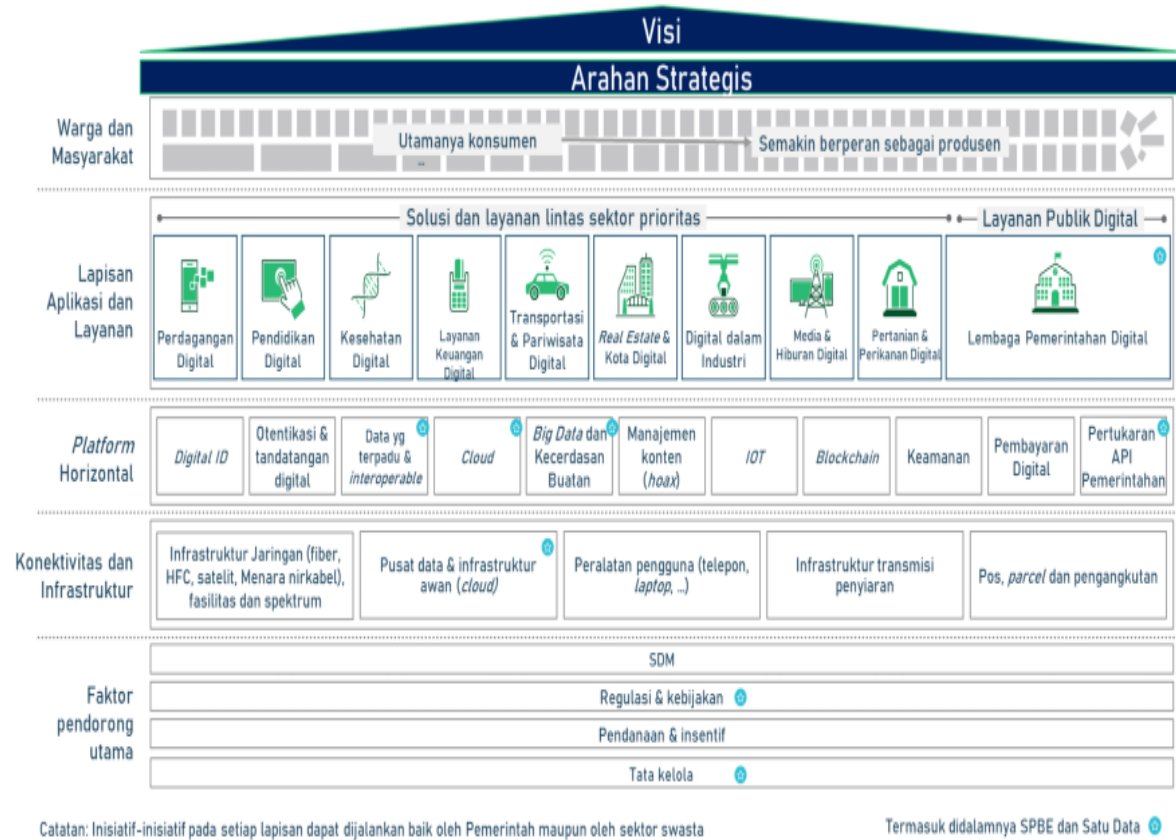
Perkembangan teknologi dan komunikasi di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk beradaptasi dengan penerapannya di seluruh lini. Internet menjadi kunci dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transformatif, adaptif, dan mendorong akuntabilitas serta transparansi. Kendala dalam penerapan transformasi digital yang muncul adalah database dan adopsi teknolog baru yang perlu dilakukan penyesuaian (Pangandaheng et al., 2022). Penerapan internet harus didukung oleh infrastruktur digital yang memadai sehingga perlunya tingkat persiapan untuk menunjang transformasi digital (Mandala et al., 2023). Transformasi digital memerlukan visi, misi, dan komitmen untuk melibatkan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih prima, dan meningkatkan kepuasan masyarakat (Firdaus et al., 2021; Mergel et al., 2019; Nursetiawan & Putra, 2021; Royyana, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mergela (2019) menyatakan bahwa dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dengan pemberian layanan publik secara real time, pemerintah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan perubahan standar operasional prosedur yang fleksibel dan lebu mudah sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi yang efektif untuk mengurangi antrian panjang dan meningkatkan pelayanan publik, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal visi dan kolaborasi dengan masyarakat sehingga menyarankan bahwa *Smart Governance* membutuhkan visi integral, tindakan hukum, kebijakan dan kolaboratif, serta kesadaran dan pendidikan publik untuk mencapai hasil yang diinginkan dari *Smart City*.

UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menetapkan empat tahapan RPJMN. Tahap akhir RPJPN, yaitu 2020-2024, sesuai dengan Perpres No. 18 Tahun 2020, menekankan pada percepatan pembangunan di berbagai sektor. Fokus utama adalah pembentukan struktur ekonomi yang kuat dan kompetitif, dengan penekanan pada pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Upaya yang dilakukan untuk merealisasikan rencana tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang dapat dilakukan dengan percepatan transformasi digital nasional yang dijabarkan dalam Kajian Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Gambar 1.1 Arah Strategis Indonesia Digital



Sumber : Lampiran 2 Rencana Strategi 2019 – 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dikutip dari berita yang diterbitkan oleh Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah sedang menginisiasi penyusunan kerangka strategi transformasi digital sebagai pedoman dalam menerapkan proses digitalisasi yang diarahkan pada 3 sektor strategis, yaitu Pemerintah Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital, yang mana implementasi *Smart City* merupakan salah satu pengembangan pemerintah digital dan menjadi target secara sektoral maupun nasional. Pondasi

dasar dari *Smart City* adalah *Smart Governance*. *Smart Governance* atau tata kelola pemerintahan kota pintar merupakan konsep sekaligus praktik dalam mengelola manajemen dan tata kelola pemerintahan dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, serta terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpandu (Purnomo et al., 2019). Dari pendapat tersebut mengartikan bahwa *Smart Governance* merupakan konsep perubahan untuk pemerintah bahwasannya perlu adanya tata kelola pemerintahan yang pintar dengan teknologi digital sebagai alat penunjang perubahan tersebut sehingga menghasilkan kinerja birokrasi yang lebih responsif, efektif, efisien, dan mampu merespon perubahan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE menunjukkan bahwa kemajuan TIK membuka kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui *e-government*. SPBE berpotensi mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab, meningkatkan kerjasama antar instansi, memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. *Smart Governance* tidak terlepas dari penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan berupaya untuk meningkatkan pengambilan keputusan melalui kolaborasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan warga negara. *Smart Governance* dapat diilustrasikan melalui penggunaan sosial media dan keterbukaan informasi. *Smart Governance* adalah model tata kelola baru yang bertujuan menjawab tantangan

masyarakat digital, tata kelola kolaboratif, berbagi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Persoalan transformasi digital di pemerintahan menjadi topik yang hangat di perbincangkan, karena dalam praktiknya banyak instansi pemerintah berlomba – lomba membuat produk digital namun pada akhirnya produk tersebut tidak beroperasi dengan baik karena aplikasi yang dibuat bukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kota Batu yang merupakan bagian dari Malang Raya berinisiatif untuk mengembangkan *Smart City* dengan memanfaatkan kemajuan TIK untuk mendukung visi dan misinya. Pemerintah Kota Batu telah mendorong instansi pemerintah menciptakan inovasi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan.

Kota Batu mempunyai sumber daya alam yang menjadi senjata dalam peningkatan *branding* daerah, sehingga dikenal dengan kota wisata. Resiko besar ketika Kota Batu menjadi kota wisata adalah ancaman kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun penggunaan lahan. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Batu berkembang seiring dengan perkembangan Kota Batu sebagai kota wisata yang menitikberatkan pariwisata bertaraf internasional. Konsekuensi dari visi ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat beragam mengingat seluruh kegiatan pemanfaatan lahan dan usaha serta kegiatan lain sangat berpengaruh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Kota Batu telah melakukan adaptasi dengan teknologi digital terbukti dengan masuknya Kota Batu dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Namun transformasi digital di Pemerintahan Kota Batu masih mengalami persoalan

yang mengakibatkan terjadinya stagnasi atau tidak dipergunakan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih minim dengan transformasi digital yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk inovasi digital. Selain itu terdapat produk inovasi digital yang tercipta bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga produk tersebut menjadi terbengkalai. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya implementasi dan pengembangan layanan digital oleh pemerintah. Kemudian infrastruktur digital yang belum memadai dan sumber daya yang masih minim juga menjadi penyebab stagnasi transformasi digital di Kota Batu. Hal tersebut mengakibatkan semua instansi pemerintah berupaya mengembangkan transformasi digital dengan pemenuhan 3 sub – dimensi *Smart Governance*.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai komitmen yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga berperan besar bagi Kota Batu sebagai kota wisata. Sebagai upaya pencapaian komitmen tersebut, Dinas Lingkungan Hidup membuat terobosan yang dapat mendorong keberhasilan tujuan, salah satu diantaranya yaitu melakukan transformasi digital. Bentuk upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu telah menerapkan transformasi digital baik terciptanya aplikasi pelayanan publik, data terpusat / terintegrasi, hingga perubahan prosedur dari yang manual ke digital.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu juga menerapkan prinsip *Smart Governance* dalam merespon perubahan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang bertolak ukur pada kepuasan masyarakat. *Smart Governance* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berfokus kepada

pelayanan mempunyai sasaran yaitu kelestarian lingkungan hidup yang selaras dengan Visi Kota Batu yang berfokus pada terwujudnya sebagai sentra agrowisata internasional yang mempunyai ciri khas serta mampu berdaya saing untuk kesejahteraan. Visi tersebut diperkuat dengan misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang berprinsip pada *good government* dan didukung dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan. Salah satu contoh inovasi yang telah di luncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu adalah produk digital yang berupa aplikasi pengaduan lingkungan hidup dan pengawasan terhadap pelaku usaha dengan nama AWas E. Dengan diterapkan aplikasi AWas E Dinas Lingkungan Hidup mempunyai harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih baik lagi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji strategi *Smart Governance* yang dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul **Analisis Strategi *Smart Governance* dalam Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan Kota Batu** mengambil studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis strategi *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang dapat menjadi bahan bacaan baru mengenai strategi *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi terhadap upaya pemerintah dalam menyelenggarakan *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital yang selama ini telah dilaksanakan. Serta sebagai masukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai strategi *Smart Governance* dalam percepatan transformasi digital Kota Batu.